

## Hasil Penelitian

# PENGARUH INDIKATOR INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (IPKD) TERHADAP KINERJA KEUANGAN KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA UTARA

**(THE EFFECT OF REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT INDEX (IPKD) INDICATORS ON THE FINANCIAL PERFORMANCE OF REGENCIES/CITIES IN NORTH SUMATERA)**

*Yanita, Iskandar Muda, Sirojuzilam Hasyim*

Universitas Sumatera Utara  
Jl. Dr. T. Mansyur No. 9, Medan, 20222  
Sumatera Utara - Indonesia  
Email: yanita.kumboro@gmail.com

Diterima: 30 Juni 2025; Direvisi: 12 September 2025; Disetujui: 09 Oktober 2025

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah (KPKPD) di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara, dengan Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) sebagai variabel moderasi. Variabel independen yang diteliti mencakup kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, pengalokasian belanja APBD, transparansi, penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah, serta opini audit BPK. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi berganda dan *Moderated Regression Analysis* (MRA), penelitian ini mengolah data sekunder dari tahun anggaran 2021 hingga 2023. Secara umum, hasil analisis menunjukkan bahwa seluruh variabel independen secara signifikan memengaruhi kinerja pengelolaan keuangan daerah. Namun, hasil MRA memberikan temuan spesifik bahwa Kapasitas Fiskal Daerah hanya memoderasi hubungan antara penyerapan anggaran dengan kinerja keuangan daerah, di mana pengaruhnya justru melemahkan hubungan tersebut. Sebaliknya, Kapasitas Fiskal Daerah tidak memiliki efek moderasi signifikan pada hubungan antara variabel independen lainnya dengan kinerja keuangan. Di antara semua indikator yang diuji, pengalokasian anggaran belanja dalam APBD dan penyerapan anggaran merupakan variabel yang paling dominan memengaruhi kinerja keuangan. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya tata kelola keuangan yang efektif melalui perbaikan sistem perencanaan dan penganggaran, optimalisasi alokasi belanja, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Implikasi praktis dari temuan ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam menyusun strategi yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan kinerja keuangan dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, kinerja keuangan daerah, kapasitas fiskal daerah

## ABSTRACT

*This study aims to analyze the effect of Regional Financial Management Index (IPKD) indicators on the Regional Government Financial Management Performance (KPKPD) in regencies/cities of North Sumatra Province, with Regional Fiscal Capacity (KFD) as a moderating variable. The independent variables examined include the alignment of planning and budgeting documents, the allocation of Regional Budget (APBD) expenditures, transparency, budget absorption, regional financial conditions, and the audit opinion from the Supreme Audit Agency (BPK). Using a quantitative approach with multiple regression and Moderated Regression Analysis (MRA), this research processed secondary data from the 2021-2023 fiscal years. The general results of the analysis show that all independent variables significantly affect regional financial management performance. However, the MRA results provide a specific finding that Regional Fiscal Capacity only moderates the relationship between budget absorption and regional financial performance, where its effect actually weakens this relationship. In contrast, Regional Fiscal Capacity has no significant moderating effect on the relationship between other independent variables and financial*

*performance. Among all the indicators tested, the allocation of APBD expenditures and budget absorption are the most dominant variables influencing financial performance. This study underscores the importance of effective financial governance through improvements in planning and budgeting systems, optimization of expenditure allocation, and enhanced transparency and accountability. The practical implications of these findings are expected to help local governments develop more targeted strategies to improve financial performance and support sustainable development.*

**Keywords:** regional financial management index, regional financial performance, local fiscal capacity

## PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan negara merupakan bagian integral dari kewenangan pemerintahan. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Presiden sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab dalam mengelola keuangan negara. Seiring dengan pelaksanaan desentralisasi atau otonomi daerah, sebagian kewenangan ini dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Presiden mendelegasikan kewenangan pengelolaan keuangan daerah kepada Gubernur, Bupati, dan Walikota selaku kepala pemerintahan daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c UU Nomor 17 Tahun 2003.

Pemerintah daerah memerlukan pengelolaan yang optimal dari berbagai aspek pendukung dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, salah satunya adalah pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan daerah menjadi krusial untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab demi mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah (KPKPD) mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola sumber daya keuangannya untuk mencapai target yang ditetapkan.

Salah satu alat evaluasi yang digunakan adalah Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2020. IPKD ini mengukur kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah menjadi tantangan penting, termasuk di Provinsi Sumatera Utara, yang menghadapi dinamika dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 900.1.15.3-372 Tahun 2024. Hasil pengukuran IPKD (Tabel 1) menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan di sebagian besar kabupaten/kota di Sumatera Utara masih perlu perbaikan. Dari 33 kabupaten/kota, hanya 1 (3%) yang memperoleh nilai A (baik), 28 daerah (84%) memperoleh nilai B (perlu perbaikan), dan 4 daerah (12%) masih bernilai C (sangat

perlu perbaikan). Data ini menunjukkan adanya ketidakstabilan dan kelemahan dalam tata kelola keuangan daerah di Provinsi Sumatera Utara, sehingga menjadi latar belakang penting untuk melakukan evaluasi lebih mendalam.

Teori-teori utama yang mendasari penelitian ini adalah Teori Keagenan, Teori Penganggaran Publik, Teori Akuntabilitas Publik, dan Teori Kapasitas Fiskal. Teori Keagenan mendasari hubungan antara masyarakat (*principal*) dan pemerintah (*agent*). Masalah keagenan muncul karena adanya konflik kepentingan dan asimetri informasi, di mana pemerintah memiliki akses lebih besar terhadap informasi operasional sehari-hari dibandingkan masyarakat yang mendelegasikan mandat. Kondisi ini dapat menyebabkan pemerintah bertindak untuk kepentingan pribadi, mengurangi akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sejumlah penelitian terdahulu telah menyoroti berbagai aspek terkait kinerja pengelolaan keuangan. Owuor (2021) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa kinerja keuangan diukur dengan menganalisis laporan keuangan dan catatan organisasi untuk periode tertentu. Salah satu indikator utama keberhasilan pengelolaan keuangan daerah adalah bagaimana anggaran yang tersedia dapat digunakan secara efisien dan efektif. Teori Penganggaran Publik menekankan bahwa proses penyusunan anggaran bersifat politis dan mencerminkan prioritas pembangunan serta distribusi sumber daya.

Sejalan dengan teori ini, perencanaan dan penganggaran yang efektif dan efisien memberikan pengaruh besar terhadap kinerja keuangan (Retnosari, 2022). Transparansi dan akuntabilitas merupakan fondasi dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang baik. Teori Akuntabilitas Publik menjelaskan kewajiban *agent* untuk mempertanggungjawabkan tindakannya kepada *principal*. Akuntabilitas mencakup transparansi informasi, audit, dan pengawasan publik. Majid (2023) menegaskan bahwa akuntabilitas sangat penting dalam proses pengelolaan keuangan daerah.

**Tabel 1.** Hasil Pengukuran IPKD Pemkab/Pemkot di Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023

No.	Kabupaten/Kota	Skor IPKD	Kategori Kinerja	Nilai
1	Medan	88,59	Baik	A
2	Tapanuli Utara	81,25	Perlu perbaikan	B
3	Asahan	81,00	Perlu perbaikan	B
4	Labuhanbatu Utara	80,23	Perlu perbaikan	B
5	Tapanuli Tengah	79,06	Perlu perbaikan	B
6	Gunungsitoli	78,26	Perlu perbaikan	B
7	Nias Barat	77,36	Perlu perbaikan	B
8	Toba	77,30	Perlu perbaikan	B
9	Dairi	76,89	Perlu perbaikan	B
10	Pematang Siantar	75,89	Perlu perbaikan	B
11	Nias	74,81	Perlu perbaikan	B
12	Pakpak Bharat	74,41	Perlu perbaikan	B
13	Mandailing Natal	73,82	Perlu perbaikan	B
14	Humbang Hasundutan	73,45	Perlu perbaikan	B
15	Padangsidimpuan	70,99	Perlu perbaikan	B
16	Deli Serdang	70,77	Perlu perbaikan	B
17	Simalungun	70,51	Perlu perbaikan	B
18	Serdang Bedagai	70,15	Perlu perbaikan	B
19	Labuhanbatu	69,62	Perlu perbaikan	B
20	Karo	69,57	Perlu perbaikan	B
21	Tebing Tinggi	69,48	Perlu perbaikan	B
22	Labuhanbatu Selatan	69,02	Perlu perbaikan	B
23	Padang Lawas Utara	67,22	Perlu perbaikan	B
24	Tapanuli Selatan	66,96	Perlu perbaikan	B
25	Binjai	65,08	Perlu perbaikan	B
26	Nias Selatan	63,84	Perlu perbaikan	B
27	Batu Bara	60,78	Perlu perbaikan	B
28	Sibolga	60,60	Perlu perbaikan	B
29	Nias Utara	59,53	Perlu perbaikan	B
30	Samosir	65,90	Sangat perlu perbaikan	C
31	Padang Lawas	64,14	Sangat perlu perbaikan	C
32	Tanjung Balai	57,85	Sangat perlu perbaikan	C
33	Langkat	53,19	Sangat perlu perbaikan	C

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 900.1.15.3-372 Tahun 2024

Isu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan daerah telah menjadi subjek penelitian yang bervariasi dengan temuan yang saling bertentangan (*research gap*). Penelitian Yassir (2022) menemukan bahwa akuntabilitas keuangan, pengawasan, dan transparansi anggaran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan. Namun, temuan ini kontras dengan beberapa studi lain. Nurarifah, dkk (2022) dan Afrianto, dkk (2024) menemukan bahwa transparansi tidak memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah.

Bahkan, Afrianto, dkk (2024) menemukan bahwa perencanaan dan transparansi justru dapat memberikan dampak negatif yang signifikan. Senada dengan itu, Nurhalimah (2024) menyimpulkan bahwa opini audit BPK memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu,

penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan cara yang berbeda. Kebaruan (*novelty*) riset ini terletak pada dua aspek:

1. Mengidentifikasi secara spesifik dimensi-dimensi IPKD yang paling berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Utara.
2. Menganalisis peran Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) sebagai variabel moderasi, untuk mengetahui apakah KFD memperkuat atau memperlemah hubungan antara dimensi-dimensi IPKD dan kinerja tata kelola keuangan.

Teori Kapasitas Fiskal menjelaskan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya fiskal untuk membiayai pelayanan publik secara berkelanjutan. Kapasitas fiskal mencerminkan kekuatan keuangan suatu daerah untuk bertahan dari guncangan fiskal. Dalam konteks teori keagenan, kapasitas fiskal

menjadi instrumen penting bagi *agent* untuk menjalankan tugasnya sesuai ekspektasi *principal*. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih tajam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan daerah, sekaligus menawarkan implikasi praktis bagi pemerintah daerah dalam menyusun strategi perbaikan yang lebih tepat sasaran.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai sumber resmi. Jenis data yang digunakan adalah data panel, yaitu kombinasi dari data *time series* (data tahunan dari 2021 hingga 2023) dan data *cross-section* (data seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara). Penggunaan data panel memungkinkan penelitian ini untuk mengukur perubahan perilaku antar waktu dan antar unit data secara bersamaan. Data sekunder ini diperoleh dari Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) mengenai hasil pengukuran IPKD, serta dokumen-dokumen resmi pemerintah daerah yang didapat dari berbagai instansi, yaitu: Badan Perencanaan

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang), Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo), dan Inspektorat di Kab/Kota di Provinsi Sumatera Utara.

Dokumen yang menjadi sumber data yaitu: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPd), Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Karena penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari lembaga resmi pemerintah, validitas data dijamin oleh otoritas dan keabsahan sumbernya. Data IPKD dan laporan keuangan pemerintah daerah telah melalui proses verifikasi dan audit internal oleh instansi terkait. Oleh karena itu, uji validitas dan reliabilitas dengan metode statistik seperti uji *Cronbach's Alpha* yang biasa digunakan untuk data primer tidak diperlukan dalam penelitian ini.

**Tabel 2.** Definisi Operasional Variabel

Variabel		Definisi Operasional	Skala Pengukuran
Kesesuaian perencanaan penganggaran ( $X_1$ )	dokumen dan	Tingkat kesesuaian antara dokumen perencanaan dan penganggaran daerah pada berbagai tahap perencanaan pembangunan	Interval
Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD ( $X_2$ )	belanja dalam APBD	Tingkat pemenuhan alokasi belanja <i>mandatory spending</i> berdasarkan regulasi	Nominal dikonversi ke Interval
Transparansi pengelolaan keuangan daerah ( $X_3$ )	pengelolaan keuangan daerah	Tingkat keterbukaan informasi pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah kepada publik	Nominal dikonversi ke Interval
Penyerapan anggaran ( $X_4$ )		Persentase realisasi belanja daerah dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan	Nominal dikonversi ke Interval
Kondisi keuangan daerah ( $X_5$ )		Stabilitas dan kemampuan keuangan daerah dalam jangka pendek dan panjang	Interval
Opini BPK ( $X_6$ )		Tingkat kepatuhan dan kewajaran laporan keuangan berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan	Ordinal dikonversi ke Interval
Kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah ( $Y$ )		Tingkat efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah	Interval
Kapasitas fiskal daerah ( $Z$ )		Kemampuan daerah dalam membiayai belanja publik secara mandiri tanpa ketergantungan yang tinggi pada transfer pusat, diukur melalui rasio antara kemampuan keuangan daerah terhadap belanja kebutuhan dasar minimum	Rasio

Sumber: Data diolah (2025)

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda untuk menganalisis hubungan antara variabel independen dan dependen, serta *Moderated Regression Analysis* (MRA) untuk mengetahui apakah variabel moderating dapat memodersi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Dalam pendekatan analisis data ini, statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji pemilihan model, uji hipotesis, dan uji moderasi dilakukan dengan menggunakan alat aplikasi Stata MP 17.0. Perumusan hipotesis penelitian berdasarkan pada urutan variable sebagai berikut:

- H1: Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah
- H2: Alokasi belanja dalam APBD berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah
- H3: Transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah
- H4: Penyerapan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah
- H5: Kondisi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah
- H6: Opini BPK atas LKPD berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah
- H7: Kapasitas Fiskal Daerah memoderasi pengaruh kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran terhadap kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah
- H8: Kapasitas Fiskal Daerah memoderasi pengaruh pengalokasian anggaran belanja dalam APBD terhadap kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah
- H9: Kapasitas Fiskal Daerah memoderasi pengaruh transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah
- H10: Kapasitas Fiskal Daerah memoderasi pengaruh penyerapan anggaran terhadap kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah
- H11: Kapasitas Fiskal Daerah memoderasi pengaruh kondisi keuangan daerah terhadap kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah
- H12: Kapasitas Fiskal Daerah memoderasi pengaruh opini BPK atas LKPD terhadap kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**Hasil Uji Asumsi Klasik. Hasil Uji Multikolinearitas.** Uji multikolinearitas dilakukan untuk memastikan bahwa tidak terdapat hubungan yang sangat kuat antara variabel independen dalam model regresi, sehingga hasil estimasi menjadi lebih valid dan tidak bias. Dalam penelitian ini, uji multikolinearitas menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIF) untuk menilai apakah terdapat korelasi tinggi antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan mempertimbangkan variabel moderasi.

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas, nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) terpusat (*Centered VIF*) untuk seluruh variabel berada di bawah angka 10, dengan rentang nilai 1,16 hingga 1,35. Nilai VIF seluruh variabel berada dalam batas aman, yang berarti antarvariabel independen tidak memiliki korelasi yang terlalu tinggi. Dengan demikian, model regresi yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikatakan bebas dari multikolinearitas, sehingga sehingga estimasi koefisien regresi dapat diandalkan dan interpretasinya tidak akan terdistorsi oleh korelasi yang tinggi antar variabel independen.

**Hasil Uji Heteroskedastisitas.** Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi kesalahan pengganggu (*e*) sehingga mempunyai *variance* yang sama atau tidak dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Metode yang digunakan untuk menguji heteroskedastisitas dalam penelitian ini adalah uji *Breusch-Pagan/Cook-Weisberg*, dengan melihat probabilitas signifikansinya diatas 0,05. Hasil uji *Breusch-Pagan/Cook-Weisberg* pada Tabel 4 menunjukkan nilai chi-square sebesar 1,07 dengan nilai *p-value* (*Prob > chi2*) sebesar 0,3011, yakni lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa data tidak mempunyai gangguan heteroskedastisitas.

**Hasil Uji Autokorelasi.** Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara residual suatu observasi dengan residual observasi lainnya dalam data panel. Dalam penelitian ini, uji autokorelasi yang digunakan adalah Uji *Wooldridge*. Uji ini mendeteksi autokorelasi orde pertama pada data panel, dengan hipotesis nol bahwa tidak terdapat autokorelasi. Hasil uji autokorelasi *Wooldridge* pada data panel menunjukkan nilai *F* sebesar 1,632 dengan *p-value* (*Prob > F*) sebesar 0,2106. Karena *p-value* ini lebih besar dari tingkat signifikansi standar 0,05, kita tidak dapat menolak hipotesis nol yang menyatakan bahwa tidak ada autokorelasi tingkat pertama dalam data panel. Hasil ini mengindikasikan bahwa model tidak mengalami masalah autokorelasi, yang berarti residual dari satu pengamatan tidak

berkorelasi dengan residual dari pengamatan lainnya.

**Hasil Uji Pemilihan Model.** Uji Chow digunakan untuk menentukan apakah model efek tetap (*Fixed Effect/FE*) lebih sesuai dibandingkan model efek bersama (*Common Effect/CE*). Secara teknis, uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai residual dari regresi FE dan CE. Jika perbedaan antara kedua model tersebut signifikan secara statistik, maka model FE dianggap lebih tepat digunakan, karena dapat menangkap perbedaan individual antar unit pengamatan (panel) yang tidak dapat ditangkap oleh model CE.

Pada hasil Uji Chow, diperoleh nilai F statistik sebesar 1,38 dengan derajat kebebasan pada pembilang dan penyebut masing-masing sebesar 32 dan 53. Nilai F yang relatif rendah seperti ini umumnya menunjukkan bahwa tidak terdapat peningkatan yang substansial dalam *goodness-of-fit* saat model berpindah dari *Common Effect* ke *Fixed Effect*. Selanjutnya, nilai

Prob > F = 0,1493 merupakan probabilitas bahwa peningkatan kompleksitas model terjadi secara kebetulan dan tidak mencerminkan perbedaan nyata antar panel. Karena nilai ini berada di atas ambang batas signifikansi konvensional seperti 0,05 atau 0,10, maka secara statistik, perbedaan antara model *Common Effect* dan *Fixed Effect* dianggap tidak signifikan. Ini menunjukkan bahwa model *Fixed Effect* tidak memberikan tambahan informasi yang cukup berarti dibandingkan model *Common Effect*.

Uji Breusch-Pagan Lagrangian Multiplier (LM) merupakan uji statistik yang digunakan untuk membandingkan model efek bersama (*Common Effect*) dengan model efek acak (*Random Effect*). Tujuan utamanya adalah untuk mengetahui apakah varians komponen error antar unit pengamatan (panel) secara signifikan berbeda dari nol. Jika varians efek individual signifikan, maka model *Random Effect* lebih tepat digunakan dibandingkan model *Common Effect*.

**Tabel 3.** Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	VIF	1/VIF
Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	1.19	0.838931
Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD	1.33	0.749890
Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	1.35	0.740582
Penyerapan Anggaran	1.16	0.863939
Kondisi Keuangan Daerah	1.21	0.829132
Opini BPK atas LKPD	1.16	0.864431
Kapasitas Fiskal Daerah	1.25	0.803018
Mean VIF	1.23	

Sumber: Data diolah (2025)

**Tabel 4.** Hasil Uji Breusch-Pagan/Cook-Weisberg

Ho	Constant variance
Variables	Fitted values of Y
chi2(1)	1.07
Prob > chi2	0.3011

Sumber: Data diolah (2025)

**Tabel 5.** Hasil Uji Wooldridge

Statistik Uji	Nilai
F-statistik	1.632
Df (numerator, denominator)	(1, 32)
Prob > F	0.2106

Sumber: Data diolah (2025)

**Tabel 6.** Hasil Uji Chow (CE vs FE)

Statistik Uji	Nilai
F-statistik	1.38
Df (numerator, denominator)	(32, 53)
Prob > F	0.1493

Sumber: Data diolah (2025)

**Tabel 7.** Hasil Uji Breusch-Pagan Lagrangian Multiplier (CE vs RE)

Komponen	Varian	Standar Deviasi
Y	200.8246	14.17126
e	1.280801	1.131725
u	0.226679	0.476109
Hasil Uji:		
Statistik Uji		Nilai
chibar <sup>2</sup> (01)		0.63
Prob > chibar <sup>2</sup>		0.2129

Sumber: Data diolah (2025)

Pada hasil uji Breusch-Pagan Lagrangian Multiplier (LM), terdapat pembagian varians terhadap tiga komponen, yaitu total varians variabel dependen Y sebesar 200,8246, varians residual acak e sebesar 1,2808, dan varians antar panel u sebesar 0,2267. Varians u yang relatif kecil dibandingkan dengan total varians dan residual menunjukkan bahwa pengaruh variasi antar panel tidak dominan. Nilai uji statistik chibar<sup>2</sup> yang diperoleh adalah 0,63, yang merefleksikan seberapa besar kontribusi komponen acak antar panel (random effect) terhadap total variasi model. Dalam kasus ini, nilai probabilitas (Prob > chibar<sup>2</sup>) yang diperoleh sebesar 0,2129 menunjukkan bahwa tidak ada cukup bukti statistik untuk menyatakan bahwa variasi antar panel berbeda secara signifikan dari nol. Dengan demikian, hipotesis nol bahwa  $\text{Var}(u) = 0$  tidak dapat ditolak. Artinya, secara statistik tidak terdapat cukup alasan untuk menggunakan model *Random Effect*.

Berdasarkan dua tahap pengujian pemilihan model, yaitu uji Chow dan uji Breusch-Pagan LM,

keduanya mengindikasikan bahwa model *Common Effect* (CE) merupakan model yang paling tepat untuk digunakan dalam analisis ini. Dengan demikian, seluruh interpretasi dan langkah selanjutnya dalam analisis panel dapat didasarkan pada spesifikasi model *Common Effect*, yakni menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS).

**Hasil Uji Hipotesis. Hasil Uji Parsial (Uji t).** Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Kriteria yang digunakan dalam mengambil keputusan yaitu apabila  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel pada  $\alpha = 5\%$  dan nilai probabilitas  $<$  level of significant sebesar 0,05 maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Namun apabila  $t$  hitung  $<$   $t$  tabel pada  $\alpha = 5\%$  dan nilai probabilitas  $>$  level of significant sebesar 0,05 maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Berikut hasil pengujian untuk uji parsial (Uji t):

**Tabel 8.** Hasil Uji Parsial (Uji t)

Variabel	Koefisien	Std. error	t-value	p-value	Interval kepercayaan (95%)
Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	1.031468	.0367974	28.03	0.000	.958375 1.104562
Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	1.122009	.0325791	34.44	0.000	1.057295 1.186724
Transparansi pengelolaan keuangan daerah	.9800286	.0326093	30.05	0.000	.9152542 1.044803
Penyerapan anggaran	1.152498	.0359678	32.04	0.000	1.081052 1.223943
Kondisi keuangan daerah	1.06427	.0827424	12.86	0.000	.899912 1.228627
Opini BPK atas LKPD	.9494304	.0270028	35.16	0.000	.8957926 1.003068
Kapasitas fiskal daerah	.2895908	.227572	1.27	0.206	-.162453 .7416345
Konstanta	-4.619783	.7781526	-5.94	0.000	-6.165488 -3.074079
Number of obs		99		R-squared	0.9925
F (7, 91)		1715.26		Adj R-squared	0.9919
Prob > F		0.0000		Root MSE	1.2755

Sumber: Data diolah (2025)

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa seluruh variabel independen dalam penelitian ini berpengaruh signifikan dan positif terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah.

1. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran (H1) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap KPKPD (t-value 28,03, p-value 0,000). Hipotesis H1 diterima.
2. Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD (H2) memiliki pengaruh positif dan signifikan (t-value 34,44, p-value 0,000). Hipotesis H2 diterima.
3. Transparansi pengelolaan keuangan daerah (H3) memiliki pengaruh positif dan signifikan (t-value 30,05, p-value 0,000). Hipotesis H3 diterima.
4. Penyerapan anggaran (H4) memiliki pengaruh positif dan signifikan (t-value 32,04, p-value 0,000). Hipotesis H4 diterima.
5. Kondisi keuangan daerah (H5) memiliki pengaruh positif dan signifikan (t-value 12,86, p-value 0,000). Hipotesis H5 diterima.
6. Opini BPK atas LKPD (H6) memiliki pengaruh positif dan signifikan (t-value 35,16, p-value 0,000). Hipotesis H6 diterima.

**Hasil Uji Simultan (Uji F).** Uji simultan (Uji Statistik F) digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat/dependen. Hasil pengujian uji simultan (Uji F) dalam penelitian ini disajikan pada tabel 9. Hasil uji simultan menunjukkan nilai F sebesar 1715,26 dengan p-value 0,000, yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa secara bersama-sama, seluruh variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah.

**Tabel 9.** Hasil Uji Simultan (Uji F)

Number of obs	99
F (7, 91)	1715.26
Prob > F	0.0000
R-squared	0.9925
Adj R-squared	0.9919
Root MSE	1.2755

Sumber: Data diolah (2025)

**Hasil Uji Moderasi.** Variabel moderasi berperan sebagai variabel yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Hasil Uji Moderated Regression Analysis (MRA) menunjukkan bahwa Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) hanya memoderasi satu hubungan dari seluruh hipotesis yang diajukan.

1. Penyerapan anggaran (X4) yang dimoderasi oleh Kapasitas Fiskal Daerah (Z) memiliki

pengaruh signifikan terhadap KPKPD (t-value -3,09, p-value 0,003). Koefisien interaksi yang negatif menunjukkan Kapasitas Fiskal Daerah melemahkan hubungan antara penyerapan anggaran dan kinerja pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, H10 diterima.

2. Untuk hubungan lainnya (H7, H8, H9, H11, dan H12), Kapasitas Fiskal Daerah tidak terbukti memiliki efek moderasi yang signifikan.

**Pengaruh kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran terhadap KPKPD.** Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian Ariesmawati (2020) tentang "Pengaruh Perencanaan dan Penganggaran terhadap Kinerja Perangkat Daerah pada Bappeda Kabupaten Kutai Timur", menunjukkan bahwa perencanaan dan penganggaran berdampak positif terhadap kinerja perangkat daerah.

Demikian pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Cheruiyot (2018) bahwa perencanaan keuangan dan penganggaran memiliki pengaruh positif signifikan pada kinerja pemerintah kabupaten di Kenya. Hal ini juga sejalan dengan Teori Penganggaran (*Budgeting Theory*), yang menyatakan bahwa proses penganggaran yang tepat dan konsisten dengan rencana strategis berperan penting dalam mencapai kinerja yang optimal. Kesesuaian antara dokumen perencanaan dan penganggaran memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih efisien, mendukung pencapaian tujuan dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.

**Pengaruh pengalokasian anggaran belanja APBD terhadap KPKPD.** Pengalokasian belanja dalam APBD berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. Kabupaten Nias memperoleh nilai terendah, yaitu 13,276. Alokasi anggaran pendidikan tidak memenuhi syarat minimal 20%, dimana Kabupaten Nias mengalokasikan anggaran pendidikan hanya sebesar 18,46% dari total belanja daerah. Di samping itu, dari 29 jenis pelayanan dasar SPM, terdapat 11 jenis pelayanan yang tidak diberikan alokasi anggaran.

Belanja daerah seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberikan perlindungan bagi masyarakat, dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar pendidikan, penyediaan fasilitas kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak, dan mengembangkan sistem jaminan sosial. Semakin tinggi belanja daerah, pemerintah daerah akan memberikan pelayanan yang lebih baik sekaligus berkualitas dan hal tersebut dapat berpengaruh

dengan tingkat kinerja keuangan (Permatasari, 2022).

Efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran yang dilakukan melalui pengalokasian belanja yang tepat serta penyelarasan belanja dengan kebutuhan dan tujuan pembangunan, berperan penting dalam meningkatkan kinerja keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian Ijtihad (2024), yang menyimpulkan bahwa pengelolaan belanja daerah memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini dapat dijelaskan melalui Teori Penganggaran (*Budgeting Theory*) dan Teori Manajemen Keuangan Publik (*Public Financial Management Theory*).

Kedua teori ini menekankan bahwa alokasi belanja yang tepat dan efektif dalam APBD berperan penting dalam mencapai tujuan kinerja keuangan yang baik, seperti halnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah (KPKPD). Teori Penganggaran menyoroti pentingnya penyelarasan belanja dengan kebutuhan dan tujuan pembangunan, sementara

Teori Manajemen Keuangan Publik menekankan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran publik untuk meningkatkan kinerja keuangan.

#### **Pengaruh transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap KPKPD.**

Transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah, dimana transparansi merujuk pada sejauh mana informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah dapat diakses dan dipahami oleh publik serta pemangku kepentingan lainnya. Transparansi berarti terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap suatu informasi seperti peraturan, kebijakan pemerintah dan lainnya yang dapat diakses oleh publik. Transparansi juga dapat membantu mengurangi peluang kecurangan seperti korupsi dan lainnya di kalangan pemerintah karena terlihat semua proses dan hasil dari kegiatan aktivitas yang dilakukan pemerintah.

**Tabel 10.** Hasil Uji Moderasi

Variabel	Koefisien	Std. error	t-value	p-value	Interval kepercayaan (95%)
Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	.9869799	.0759085	13.00	0.000	.8360535 1.137906
Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	1.244521	.06713	18.54	0.000	1.111048 1.377993
Transparansi pengelolaan keuangan daerah	.9373434	.0850096	11.03	0.000	.7683215 1.106365
Penyerapan anggaran	1.371346	.0794643	17.26	0.000	1.213349 1.529342
Kondisi keuangan daerah	1.036161	.1684653	6.15	0.000	.7012071 1.371115
Opini BPK atas LKPD	.8704143	.0678014	12.84	0.000	.7356069 1.005222
Kapasitas fiskal daerah	3.750328	1.698796	2.21	0.030	.3726651 7.12799
Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran* Kapasitas fiskal daerah	.0588634	.0735458	0.80	0.426	-.0873653 .2050922
Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD*	-.1502541	.082963	-1.81	0.074	-.3152069 .0146987
Kapasitas fiskal daerah					
Transparansi pengelolaan keuangan daerah*	.0400939	.0751781	0.53	0.595	-.1093804 .1895681
Kapasitas fiskal daerah					
Penyerapan anggaran*	-.1966615	.0636309	-3.09	0.003	-.3231768 -.0701463
Kapasitas fiskal daerah					
Kondisi keuangan daerah*	-.0654095	.1656772	-0.39	0.694	-.3948202 .2640011
Kapasitas fiskal daerah					
Opini BPK atas LKPD*	.096365	.0651735	1.48	0.143	-.0332174 .2259474
Kapasitas fiskal daerah					
Konstanta	-7.989674	1.543171	-5.18	0.000	-11.05791 -4.921437
Number of obs		99		R-squared	0.9937
F (12, 85)		1028.93		Adj R-squared	0.9927
Prob > F		0.0000		Root MSE	1.2092

Sumber: Data diolah (2025)

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Edowai, dkk (2021) dan Elkha, dkk (2020) menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Demikian pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Kromen, dkk (2023) yang menyimpulkan bahwa transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini dapat dijelaskan melalui Teori Akuntabilitas (*Accountability Theory*) dan Teori *Good Governance*.

Menurut Teori Akuntabilitas, transparansi dalam pengelolaan keuangan memungkinkan akses yang lebih luas bagi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menilai dan mengawasi penggunaan anggaran, sehingga meningkatkan tanggung jawab dan kepercayaan terhadap pemerintah. Teori *Good Governance* juga menekankan pentingnya transparansi sebagai salah satu prinsip dasar dalam tata kelola yang baik, yang berkontribusi terhadap peningkatan kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

**Pengaruh penyerapan anggaran terhadap KPKPD.** Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa penyerapan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Penyerapan anggaran yang tinggi mencerminkan efektivitas pemerintah daerah dalam mengalokasikan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan pembangunan. Sebaliknya, rendahnya penyerapan anggaran sering kali mengindikasikan adanya kendala dalam perencanaan, eksekusi, dan pengawasan anggaran, yang berpotensi menghambat kinerja pemerintah daerah dalam menyediakan layanan publik yang berkualitas.

Hasil analisis menunjukkan bahwa daerah dengan tingkat penyerapan anggaran yang lebih tinggi cenderung memiliki skor KPKPD yang lebih baik. Hal ini disebabkan oleh kemampuannya dalam mengelola belanja secara lebih optimal, memastikan realisasi program kerja tepat waktu, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Hal ini sejalan dengan penelitian Arniwita, dkk (2019) tentang "Dampak Penyerapan Anggaran Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah" yang menunjukkan bahwa serapan anggaran belanja memiliki pengaruh positif terhadap kinerja instansi. Demikian pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadhilatunnisa, dkk (2021), yang menyimpulkan bahwa penyerapan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja instansi Pemerintah Kota Bandung.

Analisis lebih lanjut mengungkapkan bahwa rendahnya penyerapan anggaran pada sebagian

besar kabupaten/kota di Sumatera Utara disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Keterlambatan dalam proses perencanaan dan penganggaran, yang menyebabkan pelaksanaan program dan kegiatan tidak berjalan sesuai jadwal.
- b. Kurangnya kapasitas manajerial dalam pelaksanaan anggaran, sehingga banyak program yang tidak dapat direalisasikan secara optimal.
- c. Hambatan dalam proses administrasi dan birokrasi, yang memperlambat pencairan anggaran dan implementasi program.
- d. Kendala teknis dalam pelaksanaan proyek dan belanja modal, seperti permasalahan dalam pengadaan barang dan jasa.
- e. Minimnya pengawasan dan evaluasi dalam pelaksanaan anggaran, sehingga banyak anggaran yang tidak terserap secara optimal.

Menurut konteks Teori Efisiensi Anggaran (*Budget Efficiency Theory*), penyerapan anggaran yang optimal mencerminkan penggunaan sumber daya publik yang efisien dan tepat sasaran, yang pada akhirnya meningkatkan kinerja keuangan daerah. Sementara itu, dalam perspektif Teori Manajemen Kinerja (*Performance Management Theory*), tingkat penyerapan anggaran yang tinggi berkontribusi pada pencapaian target kinerja yang lebih baik, termasuk dalam konteks kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

**Pengaruh Kondisi Keuangan Daerah terhadap KPKPD.** Kondisi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Kondisi keuangan daerah meliputi: kemandirian keuangan, fleksibilitas keuangan, solvabilitas operasional, solvabilitas jangka pendek, solvabilitas jangka panjang, dan solvabilitas layanan. Daerah yang memperoleh indeks terendah pada dimensi kondisi keuangan daerah adalah Kabupaten Nias Utara, khususnya pada indeks kemandirian keuangan, solvabilitas jangka pendek, dan solvabilitas jangka panjang.

Penyebab rendahnya kemandirian keuangan daerah adalah karena sumber pendapatan yang diperoleh sebagian besar berasal dari pendapatan transfer dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah mencerminkan potensi yang ada dalam daerah. Semakin besar PAD yang diperoleh pemerintah daerah maka kinerja keuangan semakin baik, karena dengan meningkatnya PAD pemerintah daerah dapat memenuhi pembiayaannya untuk belanja daerah. Hasil analisis menunjukkan bahwa daerah dengan tingkat kemandirian keuangan yang lebih baik cenderung memiliki skor KPKPD yang lebih tinggi.

Sebaliknya, daerah yang masih sangat bergantung pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat cenderung memiliki fleksibilitas keuangan yang rendah, sehingga sulit untuk mengalokasikan anggaran secara optimal sesuai kebutuhan pembangunan daerah. Hasil penelitian Ilyas, dkk (2025) menunjukkan bahwa fleksibilitas keuangan secara positif mempengaruhi kinerja. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maulina, dkk (2021), yang menunjukkan bahwa kondisi keuangan daerah dapat dinilai dengan memeriksa tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belanja modal.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kombinasi PAD yang tinggi dan belanja modal yang optimal berdampak positif terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian Padang (2023) juga mengungkapkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di kabupaten/kota di Sumatera Utara. Faktor lain yang turut mempengaruhi adalah tingkat solvabilitas daerah, dimana solvabilitas jangka pendek dan jangka panjang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajibannya baik dalam jangka waktu pendek maupun panjang.

Daerah yang memiliki solvabilitas rendah cenderung menghadapi kendala dalam pemanfaatan kegiatan pemerintahan, yang berakibat pada penurunan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, peningkatan kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat diwujudkan melalui penguatan kapasitas fiskal, optimalisasi PAD, serta perbaikan perencanaan keuangan agar lebih fleksibel dan berkelanjutan. Selain itu, strategi peningkatan solvabilitas dan stabilitas keuangan daerah juga menjadi faktor kunci dalam mendukung tata kelola keuangan yang lebih baik di kabupaten/kota di Sumatera Utara.

#### **Pengaruh Opini BPK terhadap KPKPD.**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Opini BPK memberikan gambaran objektif mengenai apakah laporan keuangan pemerintah daerah disusun dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, serta apakah pengelolaan keuangan daerah sudah memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kewajaran. Opini BPK adalah salah satu elemen penting dalam penilaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah karena dapat menggambarkan kualitas pengelolaan keuangan di suatu daerah.

Berdasarkan hasil analisis, daerah yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian

(WTP) secara konsisten cenderung memiliki skor KPKPD yang lebih tinggi dibandingkan daerah yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Daerah dengan opini TMP umumnya mengalami kendala dalam pencatatan aset, kepatuhan terhadap regulasi keuangan, dan kualitas sistem pengendalian internal.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pradnyani, dkk (2020) menunjukkan bahwa opini audit BPK berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Kurnia (2020) juga mengemukakan bahwa opini audit berpengaruh positif secara statistik terhadap kinerja pemerintah daerah. Dalam perspektif Teori Akuntabilitas, opini BPK mencerminkan tingkat kepatuhan dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Semakin baik opini yang diterima suatu daerah, semakin tinggi tingkat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah tersebut. Dengan demikian, opini BPK yang baik akan mendorong peningkatan kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah secara keseluruhan. Di sisi lain, Teori Transparansi menekankan bahwa opini audit membantu meningkatkan keterbukaan informasi mengenai pengelolaan keuangan pemerintah daerah, yang turut berkontribusi pada peningkatan kinerja keuangan.

Faktor-faktor yang menyebabkan daerah mendapatkan opini WDP atau TMP antara lain:

- a. Pengelolaan aset tetap yang belum memadai, ditandai dengan banyak daerah yang belum menjalankan sistem pencatatan aset yang akurat dan terdokumentasi dengan baik.
- b. Kelemahan dalam sistem pengendalian internal, dimana kurangnya pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah dapat menyebabkan penyimpangan atau ketidaksesuaian dengan regulasi yang berlaku.
- c. Kepatuhan terhadap peraturan yang rendah, ditandai dengan beberapa daerah masih memiliki kelemahan dalam kepatuhan terhadap peraturan pengelolaan keuangan, terutama dalam hal belanja daerah dan pelaporan keuangan.

Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui perbaikan tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas akan berdampak pada perolehan opini BPK yang lebih baik, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah di kabupaten/kota di Sumatera Utara.

**Kapasitas Fiskal Daerah sebagai Moderasi.** Temuan paling menarik (*novelty*) dari

penelitian ini adalah peran Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) sebagai variabel moderasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa KFD hanya mampu memoderasi hubungan antara penyerapan anggaran dan kinerja pengelolaan keuangan daerah. Namun, koefisien interaksi yang negatif (-0,1966) mengindikasikan bahwa KFD justru memperlemah hubungan tersebut. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa pada kabupaten/kota dengan kapasitas fiskal yang lebih tinggi, hubungan antara tingginya penyerapan anggaran dengan kinerja keuangan menjadi kurang kuat dibandingkan daerah dengan fiskal yang lebih rendah.

Fenomena ini bisa terjadi karena daerah dengan fiskal tinggi cenderung memiliki sumber daya yang melimpah dan potensi belanja yang lebih besar, namun mungkin tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang seefektif di daerah dengan keterbatasan fiskal yang terdorong untuk lebih efisien. Sebaliknya, KFD tidak terbukti memoderasi hubungan antara dimensi IPKD lainnya (kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, pengalokasian anggaran, transparansi, kondisi keuangan, dan opini BPK) dengan kinerja keuangan daerah.

Hal ini menunjukkan bahwa terlepas dari tingkat kekayaan atau kapasitas fiskal, pentingnya aspek-aspek tata kelola keuangan seperti perencanaan yang matang dan transparansi tetap konstan. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan tidak hanya bergantung pada ketersediaan dana, tetapi juga pada kualitas tata kelola yang universal dan berlaku di semua kondisi fiskal.

## KESIMPULAN

Penelitian ini secara teoritis menguatkan landasan dari teori agensi dalam konteks pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Temuan menunjukkan bahwa indikator-indikator IPKD yang meliputi: kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, pengalokasian anggaran belanja APBD, transparansi keuangan, penyerapan anggaran, kondisi keuangan, dan opini BPK, secara signifikan berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. Hal ini mendukung kerangka berpikir bahwa tata kelola yang baik dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa pengalokasian anggaran belanja dan penyerapan anggaran merupakan faktor yang paling krusial dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Meskipun kapasitas fiskal penting, temuan ini menunjukkan bahwa daerah dengan fiskal terbatas tetap dapat mencapai

kinerja keuangan yang baik jika tata kelola efektif. Oleh karena itu, perbaikan kualitas tata kelola menjadi lebih penting daripada hanya mengejar peningkatan fiskal. Kontribusi penelitian terdiri dari dua aspek utama: a) Kontribusi teoritis, yaitu memperluas literatur empiris dalam bidang manajemen keuangan sektor publik dengan menyertakan kapasitas fiskal sebagai variabel moderasi pada model hubungan antara indikator IPKD dan kinerja keuangan daerah, yang sebelumnya masih jarang diteliti secara terpadu. Penelitian ini juga memperkaya pemahaman tentang keterbatasan peran kapasitas fiskal sebagai penguat dalam semua hubungan kausal antar variabel IPKD; dan, b) Kontribusi praktis, yaitu memberikan arahan berbasis data bagi pemerintah daerah, auditor eksternal, dan pembuat kebijakan untuk menitikberatkan pemberian rekomendasi pada aspek-aspek pengalokasian dan penyerapan belanja, serta mengedepankan tata kelola yang efektif di tengah keterbatasan fiskal. Penelitian ini juga dapat menjadi instrumen evaluasi terhadap efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang berkelanjutan.

## REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa rekomendasi secara teoritis maupun praktis antara lain:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan bahan referensi dalam melakukan penelitian sejenis di provinsi lain di Indonesia, serta dapat mengembangkan penelitian dengan:
  - a. Menambahkan variabel independen maupun moderasi lain seperti tata kelola pemerintahan, kapasitas sumber daya manusia, adopsi teknologi informasi, serta peran peraturan daerah.
  - b. Menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif (*mixed methods*) untuk menangkap praktik lapangan yang tidak sepenuhnya terukur secara statistik.
2. Secara strategis, hasil penelitian ini memberikan masukan penting bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh, yakni:
  - a. Penguatan integrasi perencanaan dan penganggaran. Keselarasan antara dokumen RPJMD, RKPD, dan APBD harus dijadikan prioritas strategis guna menciptakan konsistensi dan efektivitas pelaksanaan program. Untuk itu, perlu diperkuat koordinasi antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda/Bappelitbang) sebagai

- penyusun dokumen perencanaan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang bertanggung jawab atas penganggaran, serta seluruh Perangkat Daerah sebagai pelaksana program dan kegiatan.
- b. Belanja daerah harus dirancang berbasis kinerja dan berorientasi pada hasil (*output-based budgeting*), bukan hanya kepatuhan terhadap aturan *mandatory spending*. Agar belanja daerah lebih efektif dan efisien, Pemerintah Kabupaten/Kota harus memastikan alokasi anggaran lebih diarahkan pada sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan Standar Pelayanan Minimal. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) memiliki peran strategis dalam memastikan efektivitas belanja daerah. Inspektorat perlu melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas belanja, sementara Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Dinas Sosial, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja bertanggung jawab dalam memastikan anggaran sektor masing-masing digunakan secara optimal.
- c. Dalam upaya meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah, BPKAD bersama dengan Diskominfo harus membuka akses publik terhadap informasi keuangan daerah melalui portal resmi pemerintah atau laporan berkala. Inspektorat bertanggung jawab dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip *good governance*, sedangkan DPRD melalui Badan Anggaran (Banggar) perlu mengawasi pelaksanaan anggaran agar lebih akuntabel.
- d. Untuk meningkatkan efektivitas penyerapan anggaran, BPKAD perlu mempercepat proses administrasi pencairan anggaran, dan seluruh Perangkat Daerah harus mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan agar anggaran yang tersedia dapat terserap secara optimal dan tepat waktu. Inspektorat berperan dalam melakukan pengawasan untuk menghindari keterlambatan realisasi anggaran.
- e. Pemerintah Kabupaten/Kota harus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peningkatan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi, serta mengembangkan sumber pendapatan lain yang sah. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bertanggung jawab dalam meningkatkan capaian pajak daerah melalui inovasi pemungutan pajak dan perluasan basis pajak. Pemerintah juga harus mengembangkan strategi peningkatan solvabilitas keuangan daerah. Untuk itu BPKAD perlu mengembangkan strategi pengelolaan aset daerah yang lebih produktif untuk meningkatkan sumber pendapatan lain. Selain itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pariwisata, dan Dinas Penanaman Modal dan PTSP juga memiliki peran dalam mendorong investasi dan pengembangan ekonomi daerah untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah secara mandiri, yang otomatis mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat.
- f. Untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, BPKAD perlu memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan aset daerah agar lebih transparan dan akuntabel. Inspektorat harus memperkuat sistem pengendalian internal guna mencegah penyimpangan serta meningkatkan akurasi pelaporan keuangan. Selain itu, seluruh Perangkat Daerah harus memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian ini. Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, Badan Penelitian dan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara, serta para ahli dan *reviewer* yang telah memberikan masukan berharga untuk penyempurnaan hasil penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

Afrianto, D., Sunardi, S., & Sisharini, N. 2024. Pengaruh Perencanaan, Tranparansi dan Akuntabilitas terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah melalui Pengawasan sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(3), 1115-1140. DOI:10.31955/mea.v8i3.4550

Ariesmawati. 2020. Pengaruh Perencanaan dan Penganggaran terhadap Kinerja Perangkat Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 6(2), hal 258-269. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2020.006.02.13>

- Arniwita, Santoso, A., Kurniasih, E.T., Soleh, A. 2019. Dampak Penyerapan Anggaran terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus di Provinsi Jambi). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, hal 166-170. DOI:10.33087/ekonomis.v3i2.77
- Cheruiyot, M. P. 2018. Effect of Public Financial Management Practices on Performance of Country Governments in Kenya. Thesis, University of Agriculture and Technology, Kenya. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:169934140>
- Edowai, M., Abubakar, H., & Said, M. 2021. Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai. *Indonesian Journal of Business and Management*, 4(1), 87-96. <https://doi.org/10.35965/jbm.v4i1.1184>.
- Elkha, F., & Wahidawati. 2020. Pengaruh Pengendalian Internal, Akuntabilitas, dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(3), 1-19. <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2822>
- Fadhilatunnisa, A., Suwondo, S., & Novianty, I. 2021. Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Penyerapan Anggaran terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Survey di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung). *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(3), 577-586. <https://doi.org/10.35313/iarj.v1i3.3246>
- Ijtihad, R. dan Harsono, I. 2024. Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah, Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, dan Pengelolaan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Ganec Swara*, 18(1), 41-50. DOI:10.35327/gara.v18i1.732
- Ilyas, M. J. & Abbas, M. 2025. How does Financial Flexibility and Corporate Governance affect Firm Performance in Developed and Developing Countries? *Pakistan Journal of Social Sciences*, 45(1), 13-26. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14886294>.
- Kromen, M. L. B., Manafe, H. A., & Perseveranda, M. E. 2023. Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, dan Transparansi terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Keuangan Daerah). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan (JIMT)*, 4(4), 460-468.
- Kurnia, D. 2020. Pengaruh Temuan Audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Opini Audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Struktur Anggaran terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Revenue*, 01(01), 112-124. DOI: <https://doi.org/10.46306/rev.v1i1.11>
- Majid, J., Suwandi, M., Talaohu, S. 2023. The Role of Transparency in Mediating the Determinants of Government Accountability in Indonesia. *Journal of Namibian Studies*, 34(2), 84-102. ISSN: 2197-5523 (online)
- Maulina, A., Alkamal, M., Fahira, N. S. 2021. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, 5(2), 390-399. DOI: <https://doi.org/10.52362/jisamar.v5i2.373>
- Nurarifah, R, Afrizal, & Aurora, T. 2022. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Merangin. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Universitas Jambi*, 7(2), 93-104. <https://doi.org/10.22437/jaku.v7i2.16245>
- Nurhalimah, M., Wicaksono, D. 2024. Pengaruh Opini Audit BPK dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 6(1), 78-87. DOI: <https://doi.org/10.34005/akrual.v6i1.4161>
- Owuor, G. O., Agusioma, N., & Wafula, F. 2021. Effect of Accounts Receivable Management on Financial Performance of Chartered Public Universities in Kenya. *International Journal of Current Aspects in Finance, Banking and Accounting*, 3(1), 73-83. DOI: 10.35942/ijcfa.v3i1.182
- Padang, N. N. 2023. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi (JIMAT)*, 2(2), 163-176. DOI: <https://doi.org/10.54367/jimat.v2i2.3142>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Permatasari, D. A., Trisnaningsih, S. 2022. Pengaruh Kemandirian, Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi (JIUBJ)*, 22(3), 1573-7582. DOI: <http://dx.doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2581>.
- Pradnyani, N.M.D dan Mimba, N.P.S.H. 2020. Opini Audit dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Realisasi PAD sebagai Pemediasi. *E-Jurnal Akutansi*, 30(12), 3150-3162. DOI: 10.24843/EJA.2020.v30.i12.p12.
- Retnosari, M. C., Suryawati, C., & Harto, P. 2022. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Anggaran di RSUP Dr. Kariadi Semarang. *Jurnal Manajemen Kesehatan Indonesia*, 10(3), 231-240. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/jmki/article/view/47184/22924>
- Yassir, Mursalim, Junaid A. 2022. Pengaruh Akuntabilitas Keuangan, Pengawasan Keuangan dan Transparansi Anggaran terhadap Pengelolaan Keuangan. *YUME: Journal of Management*, 5(2), 477-494.